

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Proses Kewirausahaan Sosial Pada PT. Waste4Change Alam Indonesia di Bekasi (Syachbana, 2017)	Alba Akbar Syachbana	Membahas mengenai proses terbentuknya Waste4Change dan program apa saja yang menjadi tujuan Waste4Change yang hendak dicapai.	Perbedaannya adalah membahas mengenai keterhubungan Waste4Change dengan jaringan NGO, industri, dan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang sama yakni mencapai SDGs poin 12 di Jawa Barat, khususnya wilayah Bekasi dalam mengelola sampah makanan di wilayah tersebut.
2	Pengelolaan Sampah Dari Waste4Change Terkait Permasalahan Sampah Di DKI Jakarta (dalam jurnal IJPA- <i>The Indonesian Journal of Public Administration</i> , tahun 2018)	Fitri Yuliana	Adanya pemberdayaan masyarakat yang sifatnya berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan makanan.	Proses pengelolaan sampah makanan dengan objek penelitiannya yaitu Jawa Barat.
3	The Evolution of the German anti-food waste	Johanna F. Gollnhofer	Teknik pengelolaan sampah	Jika yang dijelaskan dalam jurnal tersebut adalah Foodsharing,

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	movement: turning sustainable ideas into business (dalam Journal of Public Policy & Marketing, Journal of Marketing Management dan Journal of Macromarketing, pada tahun 2019)	dan Daniel Boller	makanan dengan cara pengomposan dan pencegahan timbulan sampah makanan melalui kampanye media sosial untuk mengajak masyarakat merubah perilaku yang dapat menimbulkan sampah makanan. Sehingga menimbulkan aksi kolektif, sehingga ide berkelanjutan dapat dijadikan bisnis.	Jerman. Maka yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah Waste4Change, Indonesia.
4	Delivery Impact and Approach of Household Food Waste Reduction Campaigns (dalam Journal of Cleaner Production, pada tahun 2019).	Gesyena Bazlyn Zamri, Nur Khaiyum Abizal Azizal, dkk.	Pengelolaan sampah makanan dilakukan melalui pendidikan, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat. Melakukan manajemen pemilahan sampah makanan melalui kampanye.	Pelayanan jasa pengelolaan sampah di Indonesia dapat melalui Waste4Change.
5	Food Waste Prevention Along The Food Supply Chain: A	Raquel Diaz-Ruiza, Montserrat	Perlu adanya pengelolaan limbah makanan yang melibatkan	Penelitian ini mengkaitkan hubungan anatara Waste4Change

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Multi-Actor Approach To Identify Effective Solutions (dalam jurnal Resources, Conservation & Recycling, pada tahun 2019.)	Costa-Font, dkk	semua pemangku kepentingan di ranah internasional, nasional, regional, dan lokal. Maka PBB membentuk target spesifik pencapaian SDGs 12.3 untuk mengurangi separuh volume limbah makanan pada tahun 2030 pada tingkat regional dan lokal, sehingga mencapai relevansi sistem pangan keberlanjutan.	dengan <i>International Solid Waste Associaton</i> beserta partisipasi aktif masyarakat Jawa Barat dalam mengatasi permasalahan sampah makanan.

Menulis suatu karya ilmiah tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu, sehingga diperlukan sebuah kajian literatur dalam memvalidasi berbagai sumber yang telah dikaji oleh penulis dalam karya ilmiahnya. Maka dari itu dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat berbagai macam sumber informasi seperti jurnal ilmiah, skripsi, laporan penelitian, media online dan berita resmi.

Literatur pertama yaitu skripsi berjudul “**Proses Kewirausahaan Sosial Pada PT. Waste4Change Alam Indonesia di Bekasi**”. Skripsi yang ditulis oleh Alba Akbar Syachbana S.Sos dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017, menjelaskan bahwa kondisi masalah sosial yang ada di

Indonesia mencakup kemiskinan, pengangguran dan kerusakan lingkungan yang mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional kesenjangan sosial memperburuk keadaan jika tidak segera diselesaikan. Melalui kewirausahaan sosial dengan menggabungkan inovasi dan kegiatan sosial diharapkan mampu memberikan manfaat sosial.

Perusahaan Waste4change sebagai kewirausahaan sosial melalui program Campaign, Consult, Collect, dan Create berkolaborasi dengan pemerintah yang salah satunya dengan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kota Bekasi menyelesaikan permasalahan sampah sehingga mencapai Indonesia bebas sampah. Pendanaan perusahaan tersebut didapatkan dari investor dan pendapatan perusahaan (Syachbana, 2017). Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai keterhubungan Waste4Change dengan jaringan NGO, industri, dan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang sama yakni mencapai SDGs poin 12 di Jawa Barat, dalam mengelola sampah makanan di wilayah tersebut.

Literatur kedua jurnal yang berjudul **“Pengelolaan Sampah Dari Waste4Change Terkait Permasalahan Sampah Di DKI Jakarta”**. Ditulis oleh Fitri Yuliana dalam jurnal *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, tahun 2018. Dalam jurnal disebutkan bahwa sekitar 90% masyarakat Indonesia belum sadar dan memperoleh edukasi mengenai pengelolaan sampah terjadi sehingga menyebabkan adanya penumpukan sampah di Indonesia.

Di DKI Jakarta terjadi peningkatan penduduk, sehingga timbulan sampah yang dibuang ke TPA Bantargebang Bekasi, Jawa Barat pun terus meningkat mencapai 7000 ton. Hal ini memunculkan permasalahan lain seperti pencemaran lingkungan dan tersumbatnya saluran air sehingga menimbulkan banjir. Meskipun

pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pemilahan sampah, namun mengalami kendala saat mengangkut sampah tersebut. Dalam menangani hal tersebut diperlukan adanya perubahan pola pikir dari masyarakat sehingga tidak membuang sampah sembarangan, sehingga memunculkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kehadiran Waste4Change di tahun 2013 memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Melalui konsultasi, kampanye, edukasi, pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan sampah, *recycling* dan *upcycling* (Yuliani, 2018). Pada penelitian ini Proses pengelolaan sampah makanan dengan objek penelitiannya yaitu Jawa Barat

Literatur ketiga jurnal yang berjudul ***“The Evolution of The German Anti Food Waste Movement: Turning Sustainable Ideas into Business”***. Ditulis oleh Johanna F. Gollnhofer dan Daniel Boller, dalam *Journal of Public Policy & Marketing*, *Journal of Marketing Management* dan *Journal of Macromarketing*, pada tahun 2019. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai gerakan *anti foodwaste* yang diawali oleh para pemulung sampah tahun 2012-2016, untuk mengajak pedagang menjual buah dan sayur yang sudah rusak. Supermarket Edekan menginisiasi kampanye produk yang dinilai sudah rusak dengan tagline *nobody’s perfect* dan restoran Misfit menampungnya untuk kemudian mengubah persepsi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemiskinan dengan mendorong pelaku usaha dan konsumen bersama-sama mengatasinya melalui kampanye berkelanjutan dan program CSR. Setiap elemen masyarakat terlibat dipermudah karena adanya foodsharing yang mewadahi kegiatan tersebut, dan di tahun 2018 berhasil mengelola limbah makanan (Gollnhofer & Boller, 2019). Jika yang dijelaskan dalam jurnal tersebut adalah Foodsharing, Jerman. Maka yang

dijelaskan dalam penelitian ini adalah kontribusi Waste4Change, Indonesia dalam menangani sampah makanan di Jawa Barat dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Literatur keempat jurnal berjudul ***“Delivery Impact and Approach of Household Food Waste Reduction Campaigns”*** oleh Gesyeana Bazlyn Zamri, Nur Khaiyum Abizal Azizal, dkk dalam Journal of Cleaner Production, pada tahun 2019. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai upaya dalam pembentukan berbagai program yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah makanan. Salah satunya dengan pendidikan, kampanye masif yang dilakukan melalui media sosial, dan pembentukan *startup* dengan fokus utamanya adalah mengatasi limbah makanan hasil dari rumah tangga. Untuk mengatasi limbah makanan diajarkan teknik penyimpanan yang baik, diajarkan teknik *composting* dan menggunakan *biofuel*. *Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation* (SWCorp) di Malaysia ikut berkontribusi namun akibat biaya programnya terhenti. Kemudian mengimplementasikan cara yang dilakukan Amerika Serikat dengan kampanye *Love Food Hate Waste* melalui siaran pers dan radio.

SWCorp menggunakan siaran radio dan pers dari Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM) mengkampanyekan dampak sampah makanan yang dikaitkan dengan lingkungan dan keislaman, serta mengelola limbah makanan dengan teknik Takakura yang di Cameron Highland, Pahang dengan tema “Composting Proyek Limbah Makanan”(Zamri et al., 2019). Dalam penelitian ini terdapat perusahaan layanan jasa pengelolaan sampah di Indonesia, Waste4Change dalam mengelola sampah makanan.

Literatur kelima jurnal yang berjudul ***“Food Waste Prevention Along The Food Supply Chain: A Multi-Actor Approach To Identify Effective Solutions”***,

ditulis oleh Raquel Diaz-Ruiza, Montserrat Costa-Font, dkk dalam jurnal *Resources, Conservation & Recycling*, pada tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan bahwa sistem pangan berkelanjutan menjadi tantangan masyarakat diakibatkan oleh produksi makanan yang menghilang sehingga menyebabkan timbulan sampah makanan, emisi gas rumah kaca, dan munculnya permasalahan kelaparan. PBB sudah menargetkan bahwa di tahun 2030 sampah makanan akan berkurang melalui kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan oleh internasional, nasional, regional, dan lokal dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran konsumen, membentuk model usaha baru, dan melalui pendekatan multi aktor salah satunya melalui program redistribusi makanan (Diaz-ruiz et al., 2019). Dalam penelitian mengkaitkan hubungan antara Waste4Change dengan *International Solid Waste Association* beserta partisipasi aktif masyarakat Jawa Barat dalam mengatasi permasalahan sampah makanan.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. *Global Governance*

Peran aktor non negara di era kontemporer menjadi sangat penting dalam mengupayakan kedaulatan negara. Diawali saat terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dilatar belakangi untuk mendorong hak masyarakat adat, mempercepat dekolonisasi, serta melakukan analisis terhadap sistemika untuk mengatasi permasalahan iklim dan pandemi. Pendefinisian dari aktor non negara adalah agen dalam negeri atau agen transnasional, yang berfungsi dalam melakukan mobilisasi kerangka *global governance* (tata kelola global), sehingga mencapai tujuannya dalam membentuk kedaulatan negara. Klasifikasi aktor non negara diantaranya kelompok masyarakat yang terorganisir, masyarakat adat, etnis

minoritas, organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil atau individu yang berinteraksi lintas batas negara, atau disebut aktor transnasional yang memiliki nilai dan keyakinan yang sama.

Membentuk sebuah jaringan dalam menentukan pola komunikasi. Dari jaringan tersebut kemudian menghasilkan timbal balik yang sifatnya non hierarki. Adapun dengan membentuk jaringan komunikasi tersebut bertujuan untuk mengubah politik dalam negeri, dan kebijakan politik internasional suatu negara. Berfokus pada *national liberation movement* dan *indigenous peoples* yang termasuk ke dalam kelompok organisasi non pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat internasional untuk memperjuangkan hak kedaulatan atau bahkan menentang sebuah kebijakan yang bertentangan semata-mata dalam rangka memperjuangkan identitas negara (Lüdert, 2023). Dalam perspektif konstruktivis, kedaulatan merupakan konsep dari fleksibilitas institusi yang dilakukan oleh negara bagian dan aktor non negara. Hal ini dihasilkan dari konstruksi sosial dengan mengindikasikan bahwa negara tidak sepenuhnya membentuk sebuah agen dalam berinteraksi membangun kedaulatan suatu negara. Aktor non negara memiliki kewenangan untuk membagi dan mendistribusikan yurisdiksi yang dinilai kompleks dan penyelesaiannya harus dengan negosiasi secara berulang karena membentuk ketidakpastian yang harus didiskusikan.

Aktor non negara mengambil peran dalam sebuah organisasi internasional untuk menganalisis apakah kepentingan yang hendak diajukan ditentang atau dibatasi oleh organisasi internasional. Negara dijadikan sebagai penentu keputusan, yang cenderung membatasi gerak aktor non negara. Akibat keterbatasan tersebut maka aktor non negara tersebut mencari akses untuk keudian dapat berinteraksi

dengan negara lain atau dengan aktor non negara lainnya. Jaringan yang terbentuk sebelumnya oleh organisasi internasional dimanfaatkan oleh aktor non negara, dalam mempengaruhi serta memperluas jaringannya secara formal dan informal. Akses itu dimanfaatkan oleh aktor non negara untuk kemudian melakukan musyawarah, melalui interaksi yang dilakukan dengan negara dan organisasi internasional. Dalam mengajukan kepentingan dan tujuan yang dijadikan tuntutan dalam mempengaruhi wacana dan mengubah perilaku aktor lain.

Seperti yang dijelaskan Finnemore (dalam Lüdert, 2023) , menulis bahwa:

“The normative claims become powerful and prevail by being persuasive; being persuasive means grounding claims in existing norms in ways that emphasize normative congruence and coherence”.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa, untuk memenangkan klaim secara normatif diperlukan tindakan adanya sebuah tindakan persuasif, yang dilakukan dengan cara menekan kesesuaian dan koherensi normatif pada norma yang sudah ada sebelumnya. Menggunakan strategi politik informasi dalam rangka menghasilkan dan mengolah informasi untuk memberikan dampak secara politis. Menggunakan politik simbolis dengan membentuk tindakan atau membangun sebuah cerita untuk mempengaruhi aktor lain khususnya negara, sehingga memperluas keterlibatan aktor dalam mempengaruhinya. Politik akuntabilitas, mengupayakan keberlanjutan dalam mengajak aktor-aktor berkuasa dan bersifat akuntabel terhadap prinsip, aturan, norma yang telah disepakati. Tindakan persuasi dijadikan untuk memberikan efek penekanan sosial, sehingga menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersangkutan dengan memaksimalkan isu ancaman.

Hasil partisipatif dari aktor non negara dipengaruhi oleh proses dalam menunjukkan signifikansi perubahan normatif tersebut.

Organisasi internasional dan anggotanya menjadi pembuka akses untuk aktor non negara berpartisipasi pada ranah global. Menjadi sebagai pemimpin norma, yang bertujuan untuk mengupayakan kedaulatan dan memperoleh otoritas sehingga dapat mempengaruhi aktor lain. Seperti para ahli yang menangani HAM, pengacara, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan individu lainnya. Mereka berperan dalam mengendalikan kendala, ketika negara memiliki permasalahan dalam membatasi peran aktor non negara, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung tuntutan dan tujuan dari aktor non negara. Adapun dinamika yang dilakukan adalah melakukan mobilisasi oleh aktor non negara, menganalisis peran anggota, dan relevansi tempat. Inilah yang dimaksud dengan *norm life cycle*. Tahapan pertamanya adalah memunculkan norma (*norm emergence phase*) untuk memobilisasi dan menyebarluaskan gerakan sosial.

Aktor non negara membentuk interaksi transnasional dan domestik, dalam memunculkan sebuah tuntutan dengan menerapkan pola boomerang sesuai dengan tekanan dari dunia internasional. Dengan membentuk jaringan, membangun koalisi, dan mengembangkan keahlian birokrasi dalam membuka akses partisipasi ke organisasi internasional, yang disebut dengan *standar setting phase*. Implementasi ketika akses aktor non negara terbuka ke organisasi internasional, maka mobilisasi yang dihasilkan lebih bersifat permanen. Aktor non negara membentuk akuntabilitas negara, menyediakan pengajaran, dan membentuk rekomendasi (Lüdert, 2023).

2.2.2. Liberalism Institutionalism

Liberalisme institusional yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane dalam bukunya yang berjudul “*Power and Interdependence*” menjadi pembahasan dalam mengkritisasi perspektif realisme dalam konteks hubungan internasional yang menyatakan bahwa sifat negara itu rasional dan berorientasi pada kepentingan nasional negaranya sendiri sehingga hal inilah yang akan menimbulkan konflik ke depannya. Menurut Keohane konflik diakui keberadaannya, namun dapat diatasi dengan adanya institusi internasional melalui pembentukan kerja sama. Tugas dari institusi internasional yakni membantu negara dalam menyelesaikan konflik sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Namun kerja sama juga dapat dilakukan sekalipun tidak memiliki kepentingan yang sama. Terbentuknya institusi internasional bertujuan untuk memfasilitasi negosiasi dan melakukan pertukaran informasi yang dinilai lebih efektif. Fungsi dari institusi internasional diharapkan mampu mengurangi ketidakpastian serta mampu meningkatkan kredibilitas dalam menjalin sebuah kesepakatan internasional (Keohane & Nye, 2011).

Adapun terjadinya kerja sama tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan memiliki keuntungan bersama. Disamping itu terdapat hambatan-hambatan yang dilalui ketika berurusan dengan institusi internasional seperti perbedaan kepentingan nasional setiap negara, kurangnya sumber daya, dan perbedaan dalam menginterpretasikan perjanjian internasional. Negara menjadi aktor penting karena negara memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan luar negeri dalam rangka membangun, mengelola, dan mempertahankan kinerja institusi internasional. Namun negara bukan satu-satunya aktor yang terlibat dalam liberalisme institusional, aktor non negara seperti perusahaan multinasional, LSM,

dan organisasi keagamaan yang memiliki peran sama pentingnya dengan negara dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri oleh suatu negara. Aktor non negara juga dapat melakukan kerja sama dengan institusi internasional dalam mencapai tujuannya.

Faktor kepemimpinan yang kuat mampu memberikan kontribusi dalam liberalisme institusional, dengan mempromosikan kerja sama internasional dapat dijadikan cara dalam rangka mengatasi konflik antar negara, sehingga membentuk hegemoni yang bersifat kooperatif. Kekuasaan terpusat yang dimiliki oleh negara digunakan untuk memimpin dan berbagi kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut melalui institusi internasional dalam mencapai tujuan bersama dan mencapai keuntungan bersama. Kekuasaan dalam konteks liberalisme institusional yang dikemukakan oleh Keohane tidak hanya dimiliki oleh negara atau aktor non negara saja, tapi juga dimiliki oleh institusi internasional dan aturan yang sudah ada dalam sistem internasional. Dengan hal ini maka kerja sama dapat terjalin dan mencapai tujuan bersama. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan disini terbagi dalam dua kategori yakni yang pertama adalah *hard power* yang cenderung mencakup pembahasan kekuatan militer, ekonomi, dan keamanan dalam rangka mempengaruhi negara lain. Kedua adalah *soft power* yang mencakup nilai, norma, dan budaya dalam melakukan persuasi dan memberikan pengaruh secara moral.

Soft power dikatakan lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama dan dapat membangun kepercayaan antar negara yang bersangkutan. Cenderung menitikberatkan pada pentingnya kerja sama dan institusi internasional yang digunakan untuk mengelola kekuasaan pada sistem internasional. Selain itu saling ketergantungan atau interdependensi juga mendorong adanya kerja sama.

Interdependensi membentuk ketergantungan antar negara di dalam sistem internasional dalam ranah perdagangan, keuangan, lingkungan, dan keamanan. Berkembangnya globalisasi membawa pengaruh besar di dunia seperti adanya peningkatan interaksi, ekonomi, dan politik antar negara. Serta memberikan kesempatan dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi dan membuka peluang kerja sama. Disamping dampak positif oleh munculnya globalisasi, dampak negatifnya pun tidak dapat dihindarkan seperti adanya peningkatan mobilitas tenaga kerja, serta persaingan pasar. Maka dengan adanya institusi internasional bertujuan untuk mengelola globalisasi secara lebih efektif.

Globalisasi dan perdagangan internasional memberikan kesempatan terbentuknya interdependensi dan meningkatkan kekuatan negara, karena kebutuhan atas sumber daya dan pasar. Namun dapat juga menimbulkan adanya eksploitasi pekerja, terjadinya degradasi lingkungan, dan munculnya perdagangan manusia. Maka diperlukan adanya regulasi dari pemerintah, yang mengatur pasar sehingga perusahaan berjalan dengan adil, efisien, dan melindungi hak individu. Regulasi dibentuk agar sumber daya lingkungan dapat dilindungi dan melalui mekanisme internasional negara-negara dapat mematuhi perjanjian lingkungan berdasarkan standar internasional. Institusi internasional seperti PBB diperlukan karena menginisiasi berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dan peralihan pada energi terbarukan, yang didukung oleh faktor politik seperti kepentingan dalam ranah ekonomi dan kebijakan dalam negeri. Permasalahan lingkungan menjadi kompleks dan perlu adanya aksi bersama dan adanya aturan internasional dalam mengatur permasalahan tersebut (Keohane & Nye, 2011).

2.2.3. *Non-Governmental Organization*

Non Governmental Organization (NGO), merupakan bentuk organisasi independen atau organisasi non pemerintah yang memiliki tujuan sosial maupun politik terhadap isu HAM, lingkungan, kesehatan, pembangunan, dan perdamaian. Makna independen dapat diartikan sebagai ketidak tergantungan pada pemerintah dan politik tertentu sehingga dalam menajankan tujuannya memiliki otonomi sendiri, tidak berorientasi pada kepentingan finansial melainkan didirikan sebagai lembaga yang berfokus pada keberpihakan sosial dan politik atas dasar hak asasi manusia, keadilan sosial, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. NGO dapat bergerak secara lokal, nasional, maupun internasional dalam memperjuangkan sebuah isu. Selain itu NGO juga berperan sebagai advokat dengan cara membangun struktur organisasi dan jaringan sehingga membentuk sebuah koalisi. Dijadikan sebagai pengawas kebijakan politik dalam memastikan akuntabilitas aktor politik.

Terbentuknya NGO bermula pada tahun 1912 sebanyak 132 organisasi berkumpul dan membentuk Union of International Associations untuk mewadahi organisasi nasional dan organisasi internasional swasta. Kemudian di tahun 1929, menghadiri acara LBB dalam membentuk Federation of Private and Semi-Official International Organizations Established di Geneva untuk mewadahi kerja sama antar organisasi internasional swasta. Dalam konferensi San Fransisco disepakati bahwa organisasi swasta dan organisasi pemerintah memiliki keterkaitan dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) dalam memberikan partisipasi dan hak suara. Barulah secara resmi di tahun 1945 berdasarkan piagam PBB diresmikan namanya menjadi Non Governmental Organization. Walaupun demikian, NGO masih memiliki batasan-batasan yang

harus dipenuhi seperti ketika memperjuangkan HAM harus berorientasi pada kepentingan internasional dan tidak merepresentasikan satu kelompok saja. Peran NGO dalam politik domestik, dijadikan sebagai kelompok dalam memperjuangkan kepentingan dengan fokus pengembangan lingkungan berlandaskan perubahan kebijakan luar negeri, adapun yang dilakukannya adalah melakukan penekanan terhadap pemerintah. Sementara di luarnya berusaha pada capaian politik dengan memberikan pengaruh melalui media, mobilisasi dukungan publik melalui demonstrasi. Dalam analisis politik domestik oleh negara berkembang, NGO berperan sebagai aktor eksternal sebagai representasi dari negara maju, dan dikatakan sebagai masyarakat sipil oleh negara berkembang.

Faktor positif dari berkembangnya globalisasi yakni memunculkan gerakan sosial yang kemudian dapat memobilisasi individu dalam memperjuangkan identitas bersama dalam merebut status quo. Dalam hal ini NGO dapat memimpin gerakan sosial dan mengkomunikasikan nya kepada publik. Partisipasi NGO selain bidang ECOSOC diperluas lagi di semua bidang PBB sehingga memberikan akses dalam kebijakan yang dihasilkan oleh PBB. Keterlibatannya di bidang HAM seperti pada tahun 1972 bersama United Nations Environment Programme. Konvensi Wina di tahun 1986 membuka peluang untuk NGO, Perusahaan multinasional, dan individu yang kemudian dilibatkan dalam perjanjian internasional dan menjadi subjek hukum internasional. Namun walaupun demikian keterlibatan dalam pengambilan keputusan masih dibatasi oleh anggota PBB lainnya. NGO berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan rezim internasional melalui tata kelola global (Willets, 2011).

2.2.4. Sustainable Development

Sustainable Development atau Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah tuntutan dalam rangka membuat kebijakan suatu negara. Hal ini berawal dari Earth Summit yang dilaksanakan tahun 1992 dan diperbarui lagi di tahun 2002, dengan hasil akhirnya yakni pembentukan Laporan Brundtland. Adapun definisi pembangunan berkelanjutan menurut Laporan Brundtland adalah kegiatan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri di masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan di generasi mendatang. Dengan cara melakukan pengelolaan yang tepat berdasarkan modal, sumber daya alam, dan lingkungan yang sudah dimiliki oleh generasi sekarang. Pembangunan merupakan sebuah kemampuan dari generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Akar sejarahnya ketika adanya publikasi ilmiah yang ditulis oleh Lynn White, Jr pada tahun 1967 berjudul *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, mengupas mengenai akar sejarah krisis ekologi (Atkinson et al., 2007), yang menjelaskan bahwa krisis ekologi terjadi diakibatkan oleh adanya eksploitasi sains dan teknologi karena adanya anggapan manusia lebih tinggi dari alam, sehingga memunculkan antroposentris oleh tradisi Yudeo-Kristiani. Membahas terkait meningkatnya sains dan teknologi justru permasalahan manusia dirasa semakin kompleks dengan munculnya krisis baru seperti krisis akibat kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, politik, informasi, dan menurunnya kesadaran mengenai lingkungan hidup. Akibatnya memunculkan permasalahan baru pula yang mengancam kemanusiaan seperti pemanasan global, polusi, peningkatan sampah, dan lain sebagainya (Amirullah, 2015).

Adanya etika lingkungan, berawal pada tahun 1970, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan oleh Norton. Norton dalam (Atkinson et al., 2007) menjelaskan bahwa etika pembangunan berkelanjutan adalah antroposentris merupakan etika dalam mempertahankan kesejahteraan dari waktu ke waktu dengan adanya persaingan dan peluang dalam waktu yang bersamaan sehingga berdampak pada masa depan. Terjadi perdebatan antara ahli ekonomi dan ahli lingkungan. Ahli ekonomi lebih menitikberatkan bahwa keberadaan manusia lah yang menjadi nilai dasar, sedangkan ahli lingkungan berkeinginan untuk memasukan unsur non manusia atau alam ke dalamnya. Akibatnya memunculkan sebuah dikotomi yang menyebabkan ahli etika lingkungan fokus pada dualisme modernisme yang menjelaskan manusia dengan non manusia, eksklusivitas moral bahwa hanya manusia yang memiliki nilai intrinsik, dan dikotomi manusia terdiri dari tubuh dan roh. Sementara ahli ekonomi menyebutkan bahwa nilai intrinsik juga terdapat pada non manusia. Hal ini didukung oleh kelompok non antroposentris yang menyetujui bahwa non manusia juga memiliki nilai intrinsik.

Perdebatan ini terus berlanjut hingga pada tahun 1990, pendapat ahli etika lingkungan dan ekonomi tidak membuktikan bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Sedangkan kaum pluralisme sepakat dengan adanya pragmatisme lingkungan, yang menyatakan bahwa manusia harus menghargai alam dengan adanya pemisahan satu jenis dengan jenis lainnya. Dalam hal ini maka perlu adanya sebuah kebijakan yang melindungi alam sehingga dapat digunakan di masa mendatang. Pragmatisme lingkungan merujuk pada permasalahan dunia nyata untuk melakukan tindakan lingkungan dan bukan hanya pertanyaan angan-angan saja, sehingga menghasilkan solusi untuk menyelamatkan lingkungan di masa mendatang.

Mengimplementasikan strategi manajemen adaptif merupakan salah satu cara dalam mengatasi masalah lingkungan. Diawali dengan membuka topik diskusi permasalahan secara terbuka untuk memberikan informasi dan mengukur sejauh mana dampak yang dihasilkannya, sehingga memunculkan kontribusi untuk melakukan perubahan dengan hasil berupa strategi administratif sebagai sebuah kebijakan untuk merespon permasalahan.

Manajemen adaptif dijadikan sebagai cara dalam menemukan konsep pembangunan berkelanjutan dan manajemen berkelanjutan dengan basis lokal, didukung oleh sains dan pembelajaran sosial dalam rangka menumbuhkan kerja sama. Hal ini sudah diaplikasikan di Amerika Serikat oleh Aldo Leopold, seorang ahli kehutanan ilmiah dan filosofis dengan mengadaptasikan cara *multi-scholar* dalam esai yang berjudul *Thinking Like a Mountain*. Ia menuliskan bahwa setidaknya ada tiga karakteristik dari manajemen adaptif yang antara lain:

1. *Experimentalism*: fase ini terjadi untuk kemudian merespon ketidakpastian dengan reversibilitas mempelajari hasil akhirnya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian di masa mendatang;
2. *Multi-Scholar Modeling*: fase yang dilakukan untuk melakukan pemodelan ruang-waktu atau hierarki terhadap sebuah masalah yang muncul;
3. *Place Orientation*: fase dilakukan dalam mengatasi permasalahan di tempat lokalnya dan didukung oleh kekuatan politik.

Hume's Law oleh David Hume menyatakan bahwa besar kemungkinan untuk menyangkal proses penyimpulan sebuah proposisi atau fakta yang seharusnya terjadi dengan nilai normatif. Karena ahli etika lingkungan mengabaikan faktor perdebatan antara fakta dan nilai. Naturalisme atau metode pengalaman

menyatakan bahwa nilai intrinsik digunakan untuk melindungi sistem, proses, dan elemen alam. Pernyataan dari Mark Sagoff sebagai ahli etika lingkungan menyatakan bahwa dengan memperkecil argumen instrumental dan memasukan nilai intrinsik dapat menyelamatkan spesies dan keanekaragaman hayati. Pernyataan tersebut pun didukung oleh J. Baird Callicott yang mengatakan bahwa nilai intrinsik didukung dengan adanya sumber subjektif. Nilai intrinsik bersifat negatif dan bertentangan dengan nilai instrumental. Sagof dan Callicott mengusulkan strategi untuk menekan nilai intrinsik dalam penggunaan instrumental, memperdebatkan perlindungan alam dengan memunculkan wacana deskriptif dan perspektif dan memisahkan alasan instrumental dengan non instrumental dalam melindungi alam. Dilakukan dengan cara menciptakan pengaruh emosional, namun pada akhirnya cara ini pun belum mampu memberikan keyakinan inter subjektif dalam memunculkan tindakan terhadap lingkungan. Cara lain yang dikemukakan oleh Bao William menyatakan bahwa faktor persuasif dalam sebuah wacana fakta dan wacana nilai tidak dapat dipisahkan kecuali menggunakan teori khusus, seperti positivisme logis yang mendiskusikan dan mengevaluasi mengenai lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga untuk memisahkan wacana kebijakan menjadi wacana fakta dan wacana nilai harus ada alternatif lain, yakni dengan mengadvokasi epistemologi pragmatis dari CS Peirce dan John Dewey antara ilmu lingkungan dengan wacana kebijakan. Dengan cara menekankan metode pengalaman untuk menuntut evaluasi dan kebenarannya. Proses berharga dalam mencapai nilai.

Sementara non naturalisme berpendapat bahwa nilai lingkungan tidak dapat dikaitkan dengan indikator lain yang dapat diukur secara ilmiah. Sehingga pembuat

kebijakan harus mengutip nilai-nilai kemudian menjelaskan pembenaran terhadap motivasi lingkungan dalam menciptakan tindakan lingkungan. Kesulitannya muncul ketika menghubungkan antara kualitas alam dan non alami yang dapat diukur secara empiris. Pemisahan antara nilai, sarana, dan instrumental menyebabkan perubahan ekologis dengan nilai-nilai sosial menjadi renggang. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengintegrasikan ilmu lingkungan dan nilai lingkungan. Mau tidak mau dalam mengindikasikan nilai sosial perlu adanya preferensi konsumen yang dikemukakan ahli ekonomi atau meminta ahli etika lingkungan untuk mengetahui apa-apa saja yang termasuk sifat non alami. Non naturalisme tidak mengharapkan kesimpulan dari proses fakta ke nilai, karena tergantung pada proses keterbukaan publik untuk menentang kepercayaan dan nilai dengan pengalaman. Kemudian diharapkan menghasilkan perubahan terhadap sikap, nilai, dan keyakinan. Diawali dengan dilakukannya reorganisasi dan rekonseptualisasi fakta untuk menghubungkan indikator nilai lingkungan, sehingga dapat diartikulasikan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan indikator tersebut. Dalam menggunakan metode manajemen adaptif berarti memiliki konteks bahwa pemangku kepentingan memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda. Keputusan yang dihasilkan ditelaah oleh ilmuwan yang berbeda dan orang yang memiliki ketertarikan. Wacana ilmu manajemen berarti menganalisa nilai tersirat dengan pemodelan masalah dan menganalisa waktu kejadian, dan mendeskripsikan sistem yang bermasalah.

Seperti proses tercemarnya Teluk Chesapeake, di Pantai Timur Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1970. Bermula ketika air teluk itu keruh di satu titik dan menyebar ke berbagai titik akibat matinya lapisan rumput bawah laut sehingga

mengubah luas teluk, hal ini dikarenakan aliran sungai yang banyak yang kemudian bermuara di teluk tersebut. Setelah dilakukan analisa oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA), diketahui bahwa permasalahan polusi diakibatkan oleh industri dan limbah yang berada di area pemukiman, pertanian, dan industri. Timbulnya pencemaran di teluk itu meningkatkan kekeruhan akibat limbah fosfor pertanian dan nitrogen, mengurangi vegetasi, dan menyebabkan peningkatan ganggang dan anoksia. Namun berkat adanya kontribusi dari penelitian pihak swasta yang bekerja sama dengan EPA, pada akhirnya mampu mengubah kesadaran masyarakat untuk lebih sadar bahwa yang mengalir ke sungai harusnya bahan organik saja. Dengan menganalisa berbagai titik aliran sungai untuk mengetahui titik polusi yang bermuara di Teluk Chesapeake dan mengubah peta aliran sungai.

Terbentuknya perubahan dramatis dalam perspektif oleh nilai-nilai kecintaan dan tidak membiarkan teluk menyebarkan polusi, diakibatkan oleh adanya proses transformasi dalam menganalisa daerah aliran sungai, sehingga menghasilkan kesadaran publik dan mengubah pemahaman ilmiah. Dalam mengatasi permasalahan kualitas air Teluk Chesapeake mendorong munculnya kampanye publik oleh *Chesapeake Bay Foundation*, sebuah yayasan swasta bertujuan untuk mengadvokasi, mendidik, dan mendukung sains dengan menyuarakan apa yang telah dirasakan oleh penduduk sekitar teluk. Pemetaan berbasis nilai dari sistem alam dengan memasukan permasalahan polusi menghasilkan model budaya dan pengelolaan Teluk Chesapeake menghasilkan kerja sama lintas negara sebagai langkah mengatasi polusi dan pencemaran Teluk Chesapeake yang dikhawatirkan menyebar ke titik lainnya.

Munculnya nilai-nilai sosial yang kemudian dihubungkan dengan sistem lingkungan dan ekologi sebagai model budaya maupun ilmiah dari permasalahan yang ada. Kesamaan tujuan menghasilkan musyawarah publik sehingga memunculkan pemahaman bersama dalam mengatasi permasalahan. Namun jika kondisi sebaliknya akan berakibat pada pelemahan tindakan kooperatif dan eksperimental yang memecah belah masyarakat. Keanekaragaman perspektif dan nilai merupakan inti dari cara untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Masalah dikategorikan menjadi jinak dan jahat oleh Rittel dan Weber. Masalah jinak dalam artian mudah dipecahkan sementara masalah jahat tidak memiliki solusi yang pasti. Permasalahan lingkungan dikategorikan sebagai permasalahan yang jahat karena telah mempengaruhi banyak nilai, elemen komunitas berbeda, dan memunculkan pengembangan dari berbagai model pemahaman untuk memulihkannya. Perlawanan terhadap perumusan masalahnya pun diperlukan negosiasi berulang dalam menentukan solusi sementara dan membangun kesepakatan tindakan dalam mengatasi permasalahan.

Keterbukaan sementara menjadi salah satu aspek dari masalah jahat, karena membentuk sebuah sistem yang besar dan memberikan pengaruh besar pula sehingga penyelesaian perlu menggunakan pemodelan. Dalam mendefinisikan hubungan ruang-waktu beserta kompleksitasnya, ahli ekologi memperkenalkan model hierarki teori. Aldo Leopold menganalisis ketika ia menyingkirkan serigala ketika rusa kelaparan dan hal ini yang menjadi konsekuensi jangka panjang karena spesies tersebut berperan dan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam sebuah sistem. Aktivitas manusia yang dikaitkan dengan meningkatkan kebutuhan konsumen dari kekayaan alam, berdampak pada generasi berikutnya. Menggunakan

kerangka tindakan, menjadi cara untuk melakukan evaluasi dalam melakukan perubahan yang didominasi oleh manusia.

Hierarki teori menitikberatkan pada individu yang dikategorikan sebagai peluang dan kendala. Maksudnya individu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup dan berkembang biak, maka dalam mempertahankan kondisi lingkungan dari generasi satu ke generasi lainnya perlu adanya tindakan kolektif. Kompleksitas individu dari dikategorikan sebagai peluang dan kendala dalam beradaptasi dengan lingkungan dari waktu tertentu, memunculkan skema keberlanjutan yang mendefinisikan bahwa individu di generasi sebelumnya jika menggunakan sumber daya yang berlebihan maka tidak akan menciptakan peluang baru, dan menjadikan permasalahan pada generasi selanjutnya. Hierarki teori dan pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Maslow menjelaskan keterkaitan antara kebutuhan manusia dengan pembangunan berkelanjutan serta mengatasi permasalahan sampah makanan. Pembangunan berkelanjutan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan yang aman dikonsumsi dan bergizi serta kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan kebersihan. Pada intinya manajemen adaptif memberikan kesimpulan mengenai keberlanjutan adalah memerlukan gabungan analisis multi skala dan multi kriteria yang berpedoman pada generasi sekarang dan generasi masa mendatang. Hubungan tersebut dikategorikan normatif karena tidak dapat diukur hanya dengan ekonomi namun melibatkan kesetaraan antar generasi (Atkinson et al., 2007).

2.2.5. Wirausaha Sosial

Pada buku yang berjudul *Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know* karya David Bornstein dan Susan Davis, dijelaskan bahwa pengertian

wirausaha sosial memposisikan diri sebagai individu atau organisasi pada strategi bisnis dalam mencapai tujuan sosial dan mencapai keuntungan finansial, melalui inovasi sosial dalam rangka mengatasi kompleksitas permasalahan sosial. Wirausaha sosial berkontribusi pada perubahan sosial berkelanjutan, menggunakan pemodelan bisnis berkelanjutan sehingga mencapai keuntungan finansial dalam jangka panjang dan mendapatkan manfaat sosial. Memiliki kemampuan dalam mengukur dampak sosial dari bisnis yang dijalankan, sehingga memunculkan penilaian keefektifan dalam menentukan solusi yang dapat menciptakan perubahan sosial yang positif. Perbedaan yang nyata antara wirausaha sosial, organisasi nirlaba, dan bisnis sosial adalah tujuannya karena organisasi nirlaba dan bisnis sosial hanya menekankan pada pemberian manfaat sosial saja.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam membangun wirausaha sosial terkait strategi dalam tata cara mengembangkan skala sehingga memberikan dampak besar terhadap perubahan sosial. Terkait keberlanjutan keuangan dengan model bisnis berkelanjutan sehingga mendapatkan keuntungan jangka panjang. Masalah pembiayaan dalam mendirikan wirausaha sosial. Menciptakan inovasi sosial sehingga mencapai efektifitas dan berkelanjutan. Tantangan selanjutnya ketika membangun kolaborasi dalam rangka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai visi dan misi yang selaras dengan tujuan sosialnya. Inovasi sosial penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, maka strategi yang dilakukan oleh wirausaha sosial dimulai dari memahami permasalahan sosial yang hendak diselesaikan, sehingga menciptakan identifikasi solusi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Membentuk inovasi sosial berupa pengembangan produk atau pelayanan sebagai bentuk baru, atau

merekomendasikan metode penyelesaian masalah sosial. Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan tujuan dengannya. Mampu mengukur perkiraan dampak sosial terhadap solusi permasalahan sosial sehingga memunculkan efektivitas. Memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan dalam pengembangan model bisnis yang hendak dibangun. Menyebarkan informasi dan memperluas solusi sehingga menciptakan perubahan sosial yang menyeluruh (Bornstein & Davis, 2010).

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan berbagai literatur yang digunakan penulis sebagai sumber penelitian dan tinjauan literatur sebagai pembanding, asumsi dari penelitian ini adalah Waste4Change merupakan wirausahawan sosial yaitu perusahaan layanan jasa dengan menggunakan model bisnis untuk mencapai tujuan sosial yang berkelanjutan. Waste4Change bekerja sama dengan organisasi dalam mengembangkan teknologi dan inovasi dalam manajemen sampah, serta mendorong masyarakat Indonesia untuk mengadopsi perilaku zero waste. Sehingga berkontribusi dalam capaian *responsible consumption and production* di Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat dan organisasi internasional dalam mengelola dalam mengembangkan teknologi dan inovasi dalam manajemen sampah.

2.4. Kerangka Analisis

